BAB III

DATA HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Sejarah Departemen Tenaga Kerja tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, Kementrian atau Depertemen diserahi tugas untuk menangani masalah ketenaga kerjaan berulang kali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.

Dalam periode perang kemerdekaan yaitu masa Kabinet Presidentil, masalah perubahan dibawah dan ditangani oleh Kementrian Sosial. Keadaan ini berlanjut sampai masa Kabinet Syahril III. Penggantian kabinet berulang kali, serta lahirnya partai-partai politik yang mewarnai gerakan kaum buruh, menjadikan penanganan masalah perburuan semakin pelik, apalagi disertai oleh memburuknya keadaan ekonomi dan dalam keadaan perang

Maklumat Presiden.Nomor 7 Tahun 1947 yang diumumkan pada tanggal 3 Juli1947 tentang susunan Kabinet Amir Ayaripudin, telah di lantik Menteri Perburuan. Namun Menteri Perburuan belum dapat tugas pokok dan fungsinya, sebab belum ada ketetapan mengenai apa yang menjadi tugas pokoknya. Dengan di keluarkan penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947, eksistensi tugas pokok kementerian perburuhan mulai

berfungsi, setelah adanya pelimpahan sebagian tugas kementerian sosial, termasuk di dalamnya pelimpahan Organisasi Jawatan perburuhan, personil dan mata anggarannya. Oleh karena itu tanggal " 25 Juli " berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor kep-288/MEN/1992 ditetapkan sebagai " hari Jadi " Departemen Tenaga Kerja .

Setelah Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan di ganti oleh Kabinet Hatta tugas pokok Kementerian perburuhan mencakup pula tugas urusan–urusan sosial, sehingga nama Kementerian perburuhan berubah menjadi Kementerian perburuhan dan sosial. Pada masa Kabinet Hatta terjadi peristiwa clas II yang di ikuti dengan di bentuknya Kabinet darurat, dimana Kementerian perburuhan dan Urusan Sosial di perluas tugas dan fungsinya, menjadi Kementerian perburuhan, Sosial, Pembangunan, Pemuda dan Keamanan. Periode perang Kemerdekaan tercatat 8 orang Menteri pernah memimpin Kementerian perburuhan, untuk 11 kali masa Kebinet, diantaranya 4 Menteri Menteri Sosial dalam 4 kali masa bhakti kabinet (keadaan sebelum dibentuk Kementerian perburuhan).

Periode Demokrasi Liberal , Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Organisasi Kementerian perburuhan tidak mencakup urusan Sosial. Pada masa RIS di Yogyakarta merupakan negara bagian dari RIS, sehingga pada masa itu Menteri perburuhan RIS dan Menteri perburuhan di Yogyakarta. Setelah RIS bubar struktur organisasi Kementerian perburuhan nampak lebih lengkap kerena mencakup struktur organisasi tingkat pusat sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Di tingkat pusat organisasi Kementrian Perburuhan terdiri dari dua Direktorat yaitu Direktorat Hubungan dan

Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja (PMP 79 tahun 1954). Dalam periode Demokrasi Liberal tercatat 8 orang Menteri Perburuhan dalam jangka waktu 10 kali masa Kabinet, termasuk Menteri Perburuhan Pemerintahan RIS.

3.2 Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kerja adalah bagian dari struktur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang di dalam pelaksaaan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh 4 seksi, yaitu :

1. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja
3. Seksi Informasi Pasar Kerja
4. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

3.3 Seksi Informasi Pasar Kerja

Seksi Informasi Pasar Kerja adalah salah satu seksi dari Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya mengumpulkan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat luas melalui loket informasi , lembar informasi, media cetak maupun media elektronik, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta organisasi lainnya dalam bidang ketenaga kerjaan.

3.4 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Struktur organisasi pada suatu instansi merupakan gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Bandung merupakan organisasi garis, fungsional dan staf, meliputi unsur kepala dinas, unsur kepala bagian dan Sub. bagian, kepala Sub. Dinas, kepala seksi dan pelaksana, selain itu juga ada kelompok jabatan fungsional, Unit Pelaksan Teknis (UPDT) dan cabang dinas yang tanggung jawab langsung kepada kepala.

Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di Dinas Tenaga Keja Kota Bandung sebagai berikut :

a) Kepala Dinas.

b) Bagian Tata Usaha, mebawahkan :

1) Sub Bagian Umum.
2) Sub Bagian Kepegawaian
3) Sub bagian Keuangan.

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawakan :

1) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja.
2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.
3) Seksi Informasi Pasar Kerja.
4) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja.

e) Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan :

1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Lembaga Latihan Kerja.
2) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan swasta.
3) Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja.
4) Seksi Sertifikasi dan Lisensi Kerja.

f) Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mebawahkan :

1) Seksi pengembangan Hubungan industrial.
2) Seksi Pengurusan Persyaratan Kerja.
3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama ketenagakerjaan.
4) Seksi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan.

g) Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, mebawahkan :

1) Seksi pengawasan norma Kerja.
2) Seksi Keselamatan Kerja.
3) Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Hygiene Perusahaan.
4) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Tenaga Keja Anak dan Wanita.

h) Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penganggur, Membawahkan :

1) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Formal.
2) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal.

3) Seksi Pemberian Kerja Sementara.

4) Seksi Pengembangan Transmigrasi.

i) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

j) Cabang Dians Tenaga Kerja.

3.5 Job Description

a) Kepala Dinas

Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dalam bidangpenempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur serta ketatausahaan Dinas.

b) Bagian Tata Usaha

Memimpin , Mengatur, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksaaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha dalam bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rencana dan program serta administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja.

c) Kepala Sub Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Kerja.

Memimpin , Mengatur, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksaan kegiatan penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasaan kerja, informasi pasar kerja serta penggunaan tenaga kerja warga negara asing.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Pegawai Negeri yang diberi tugas, wewenang, Tanggung Jawab, serta hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

e) Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

Memimpin , Mengatur, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksaaan kegiatan kerja pelatihan dan produktivitas lembaga latihan kerja, pembinaan lembaga latihan swasta dan pembinaan produktivitas tenaga kerja serta sertifikasi dan lisensi kerja.

f) Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Memimpin , Mengatur, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan hubungan industrial, pengurusan, persyaratan kerja, pengembangan kelembagaan dan kerjasama ketenagakerjaan serta penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

g) Kepala Sub Dinas pengawasan Tenagakerjaan.

Memimpin , Mengatur, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan kerja, pengawasan norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan serta pengawasan norma jamsostek, tenaga kerja anak dan wanita.

h) Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penganggur.

Memimpin , Mengatur, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor formal, pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor informal, pemberian kerja sementara dan pengembangan transmigrasi.

i) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Suatu unit di dalam pelaksanaan kerjanya mencakup Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Hygiene Perusahaa, Kesehatan dan Kesel;amatan Kerja, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.

j) Cabang Dinas Tenaga Kerja

Pembentukan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Tenaga kerja di Tingkat Wilayah dan atau Kecamatan serta pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

3.6 Susunan Pengurus Seksi Informasi Pasar kerja

Susunan kepengurusan Seksi Informasi Pasar Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terdiri dari :

Kepala Seksi : Hendry Hendarwan, SE


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM